

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan pada bab V, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Gambaran nyata pembiayaan SD, SMP dan SMA per anak per tahun di Jawa Barat adalah sebagai berikut:
2. Pemenuhan biaya operasional dan investasi sekolah SD dan SMP saat ini ditanggung oleh pemerintah pusat melalui program bos pusat, ditanggung oleh pemerintah propinsi melalui program bos propinsi, dan kab./kota melalui bos pendamping. Untuk SMA, pemenuhan biaya operasional hanya ditanggung oleh dana BOS propinsi, sedangkan dari pemerintah pusat dan Pemerintah daerah tidak ada alokasi secara khusus. Untuk biaya investasi, dana didapatkan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, maupun pemerintah daerah kab./kota.
3. Dilihat dari pembiayaan pendidikan nyata saat ini Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah memberikan kontribusi yang besar untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Namun demikian, dukungan ini baru mencapai kondisi minimal, belum untuk mendukung penyelenggaraan sekolah yang bermutu. (rincian persentase peran propinsi melalui BO dan BIS dapat dilihat pada bab V)

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian, peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran Bagi Pemerintah Propinsi Jawa Barat

- a. Dalam penyusunan anggaran pendidikan seyogyanya ada sinergi antara pemerintahan kab./kota dan propinsi serta pusat untuk penyusunan program-program dalam penyelenggaraan pendidikan beserta biaya yang menyertainya.
- b. Perubahan paradigma pembiayaan pendidikan mikro dan makro dari konsumsi menjadi investasi. Lebih jauh, item-item pembiayaan harus berbasis kinerja dan mengacu pada pemecahan masalah pendidikan yang diorientasikan pada upaya pencapaian visi dan misi institusi baik kab./kota maupun propinsi.
- c. Untuk mendapatkan keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin, Pemerintah Propinsi Jawa Barat harus secara khusus mengalokasikan beasiswa bagi anak dari keluarga miskin.
- d. Untuk kelancaran perencanaan, penggunaan, dan akuntabilitas dana bos yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat, seyogyanya dana-dana operasional dan investasi tidak dialokasikan untuk membiayai komponen biaya yang sama didanai oleh pemerintah pusat melalui dana bos atau program lainnya.

2. Saran Bagi Pemerintah Kab./Kota

- a. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dasar dan menengah di Kab./Kota, seyogyanya pemerintah daerah memenuhi anggaran 20% untuk alokasi biaya pendidikan dari APBD nya masing-masing. Hal ini ditujukan untuk lebih luasnya pemerintah kab./kota dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu.
- b. Mengingat besarnya biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah dan minimnya PAD yang dimiliki oleh masing-masing kab./kota di Jawa Barat, maka seyogyanya pemerintah daerah kab/kota menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industry untuk turut membiayai pendidikan. Pembiayaan dari dunia industry dapat dialokasikan secara khusus untuk membiaya komponen atau item tertentu dalam biaya operasional atau biaya investasi.
- c. Untuk kepentingan efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan, pemerintah daerah kab./kota seyogyanya menyusun rencana pembiayaan pendidikan dengan melibatkan stakeholder pendidikan, menggunakan biaya dengan prinsip transparan, dan melakukan akuntabilitas pendidikan bersama dengan stakeholder.
- d. Untuk kelancaran pengelolaan pembiayaan pendidikan pada level sekolah (mikro), seyogyanya pemerintah daerah--sebagai pihak yang memiliki kewenangan pokok dalam penyelenggaraan pendidikan dasar

dan menengah--membuat pedoman mengenai perencanaan, penggunaan, dan akuntabilitas biaya di tingkat sekolah.

3. Saran Bagi Kepala Sekolah dan Guru

- a. Untuk kepentingan perencanaan, penggunaan dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan yang lebih baik di sekolah, sebaiknya sekolah menggunakan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sehingga setiap dana yang dibutuhkan dan dimiliki dapat dikelola dengan lebih baik.
- b. Dalam system sekolah, orang tua merupakan pelanggan kedua, setelah peserta didik. Akan hal itu, sebaiknya orang tua siswa selalu dilibatkan dalam berbagai hal terkait dengan pengelolaan keuangan sekolah.
- c. Untuk mendapatkan manfaat biaya yang lebih baik, kepala sekolah sebaiknya membuat peta pembiayaan dengan alokasi utama pada dukungan penyelenggaran KBM yang efektif.
- d. Untuk kelancaran pengelolaan keuangan sekolah, kepala sekolah perlu mengupdate kemampuannya dalam mengelola keuangan, khususnya dalam kemampuan wirausaha dan berbagai informasi kebijakan pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, propinsi, maupun kab./kota.